

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, adanya desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, menjadi tuntutan masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas. Hal ini memaksa pemerintah baik pusat maupun daerah, untuk mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan bertanggung jawab (Rohman dkk., 2020). Fenomena perkembangan laporan keuangan pemerintah saat ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam menyampaikan informasi laporan keuangan kepada pemakainya merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas kinerja keuangan pemerintah (Halim dan Kusufi, 2017).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk memantau dan mengatur kinerja manajer dalam melaksanakan anggaran yang telah ditentukan. Pemerintah memiliki kewajiban memberi informasi keuangan dan informasi lainnya yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak lain yang berkepentingan (Eriani dkk., 2018).

Indrayani dan Widiastuti, (2020) menyatakan bahwa instansi seperti pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat menunjukkan bahwa pimpinan perangkat daerah mempunyai tujuan baik, sehingga berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Firmansyah dkk., 2022).

Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila memiliki karakteristik kualitatif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu 1) relevan, artinya informasi dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat oleh pengguna dalam pengambilan keputusan dan memberikan *feedback* dalam perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja masa depan 2) andal, maknanya informasi yang disajikan tidak mengandung manipulatif dan disajikan secara jujur 3) dapat dipahami, artinya laporan keuangan menyajikan informasi yang mudah dipahami masyarakat secara jelas dan sederhana dan 4) dapat dibandingkan, artinya informasi keuangan bisa dijadikan pembandingan dari kinerja masa lalu dan pembandingan kinerja instansi lain yang sejenis (Yuditiya dkk., 2023).

Selain hal tersebut opini atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menjadi penilaian untuk melihat kualitas laporan keuangan. Dan ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi tanda bahwa laporan keuangan dianggap sudah berkualitas. Di Kabupaten Batang Hari selama delapan tahun berturut-turut telah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Opini BPK atas LHP LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2012-2022

| Tahun Anggaran | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Opini BPK | WTP-DPP | WTP-DPP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |

Sumber: BPK Perwakilan Provinsi Jambi

Atmaja & Probohudono, (2015) berpendapat bahwa mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, tidak dapat menjamin laporan keuangan bebas dari temuan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan kelemahan sistem pengendalian internal biasanya ditemukan ketika pejabat yang bertanggungjawab kurang cermat dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan, lemah ketika mengawasi dan mengendalikan tindakan yang tidak sepenuhnya memenuhi peraturan. Temuan yang berkaitan dengan kelemahan ketidakpatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dan akuntabilitasnya kurang baik (Yuditiya dkk., 2023).

Laporan hasil pemeriksaan BPK yang memuat temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan kerugian finansial berupa kerugian daerah, potensi kerugian daerah, dan kekurangan pendapatan daerah. Sedangkan ketidakpatuhan yang menyebabkan kerugian tapi tidak berdampak secara finansial berupa penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (Yuditiya dkk., 2023).

Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari perlu dikaji kembali karena terdapat beberapa temuan BPK diantaranya kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan-undangan. Permasalahan ketidakpatuhan atas pemeriksaan LKPD tahun 2020 yaitu terkait penganggaran pendapatan pemerintah Kabupaten Batang Hari tidak berdasarkan perkiraan terukur dan dapat dicapai dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan serta belanja daerah tidak didasarkan pada kemampuan keuangan daerah. Misalnya seperti Pajak Reklame dan Pajak Parkir yang realisasinya melebihi anggaran. Serta Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Sarang Burung Walet yang realisasinya belum mencapai anggaran. Berdasarkan data yang diketahui ternyata Bakeuda tidak mempunyai data dan dokumen pendukung mengenai dasar perhitungan dalam menetapkan APBD maupun APBD-P dan pembahasan anggaran dalam waktu yang singkat hanya dua sampai tiga hari. Kemudian pada saat pembahasan penganggaran pendapatan tersebut diakui belum menghitung data potensi pajak, tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2020, sehingga penerimaan daerah tidak terukur secara rasional.

Selain itu adanya kekurangan volume tiga paket pekerjaan pada pekerjaan belanja modal, gedung dan bangunan di RSUD Hamba dan Dinas Kesehatan sebesar Rp353.725.493, yaitu kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pembangunan gedung kamar operasi RSUD Hamba sebesar Rp58.013.187, kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan rehabilitasi dan penambahan ruangan puskesmas Tidar Kuranji sebesar

Rp35.660.394, dan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan belanja modal pembangunan puskesmas Bungku sebesar Rp260.051.91. Kondisi tersebut salah satunya tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat 1 Huruf (f) bahwa pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika antara lain menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara (LHP atas LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2020).

Ketidakpatuhan atas pemeriksaan LKPD tahun 2021 antara lain realisasi belanja atas kegiatan tahun 2020 sebesar Rp13.154.608.179 tidak diakui sebagai kewajiban Tahun Anggaran 2020 namun dibayarkan dan dibebankan pada tahun 2021. Realisasi belanja tersebut tidak dicatat sebagai utang per 31 Desember 2020 sehingga membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, kondisi ini salah satunya tidak sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 lampiran I.13 pernyataan nomor 12 laporan operasional, paragraf 32 yang menyatakan bahwa beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset serta terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Permasalahan ini menyebabkan lebih saji beban pada laporan operasional Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.154.608.179 dan pengeluaran berpotensi mengganggu pelaksanaan kegiatan belanja tahun 2021.

Selain itu adanya kekurangan volume atas empat paket pekerjaan sebesar Rp433.584.772 pada Dinas PUPR. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan salah satu ketentuan yakni Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pada pasal 6 yang menerapkan pada prinsip efisiensi, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Serta pengelolaan aset tetap pada pemerintah Kabupaten Batang Hari yang tidak tertib, seperti aset tetap peralatan dan mesin dicatat tidak terpisah pada tiga OPD yaitu Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp2.184.939.756. Serta terdapat aset tetap peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya pada tiga OPD sebesar Rp2.086.923.024 yaitu pada

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa lampu tembak MTQ yang sudah tidak ada pada posisinya akibat ulah pihak yang tidak bertanggungjawab, pada Dinas Kesehatan berupa *Medical Cabinet* hanya ditemukan 26 buah dari jumlah awal 47 dan kursi tunggu pasien tiga dudukan ditemukan 29 buah dari jumlah awal 41. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa *Client Clearing House* hanya ditemukan satu buah dari total 120 buah dan *Client PC* tidak ditemukan keberadaannya (LHP atas LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2021).

Permasalahan ketidakpatuhan atas pemeriksaan LKPD tahun 2022 yaitu pengenaan denda keterlambatan pada kontrak dan perubahannya tidak sesuai ketentuan serta terlambatnya penyelesaian pekerjaan pada Dinas PUPR yang belum dikenakan sanksi denda Rp8.044.198.000 mengakibatkan kekurangan penerimaan atas sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa dari 59 paket kontrak yang dibiayai pinjaman daerah, ada sebanyak 11 paket kontrak pada Dinas PUPR yang penyelesaiannya terlambat, namun belum dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Akibat PPK selaku pihak yang mengendalikan kontrak tidak mengetahui ketentuan pengadaan barang dan jasa. Sehingga kondisi tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) huruf (f) yang menyatakan bahwa “para pihak terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika antara lain menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.

Selain itu adanya pemotongan iuran BPJS kesehatan Rp1.804.227.980 dalam perhitungan TPP ASN tidak tepat hingga mengakibatkan jumlah TPP tahun 2022 kurang diterima oleh ASN yang berhak, kemudian terdapat belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp460.329.396 yang mengakibatkan kelebihan bayar. Berdasarkan rekapitulasi belanja perjalanan Dinas pada enam OPD belanja perjalanan dinas fiktif sebesar Rp321.197.046, tidak didukung bukti yang sah sebesar Rp53.489.200 dan perjalanan dinas ganda sebesar Rp85.643.150. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan salah satu ketentuan

PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan “setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah”. Selain itu juga ditemukan adanya kekurangan volume dan mutu pada sembilan paket kontrak pekerjaan dinas PUPR Rp6.681.054.700 yang juga mengakibatkan kelebihan bayar, kemudian belum memadainya penatausahaan dan pengamanan aset tetap tanah yang tidak didukung bukti kepemilikan senilai Rp114.791.555.187 dan bukti kepemilikan sertifikat atas pihak lain Rp15.603.025.372 berpotensi menjadi sengketa dan/atau diklaim oleh pihak lain serta nilai aset tetap tanah lebih saji Rp6.429.300.000 pada neraca per 31 Desember 2022 (LHP atas LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2022).

Laporan keuangan yang berkualitas yaitu penyajian laporan keuangan secara transparan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut berkualitas. Karena, transparansi merupakan upaya pemerintah daerah untuk meyakinkan masyarakat bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan sesuai dengan standar aturan yang berlaku (Firmansyah dkk., 2022). Fiddin & Domos, (2020) menyatakan bahwa sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat di bidang keuangan, pemerintah harus mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan cara transparansi penggunaan sumber keuangan (Yuditiya dkk., 2023).

Laporan keuangan yang berkualitas dapat diperoleh jika penyusunannya dilakukan sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Rahmawati dkk., 2018). Untuk mengurangi risiko kesalahan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dan menghasilkan informasi yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan dapat dilakukan jika penerapan pengendalian intern nya efektif (Alminanda & Marfuah, 2018). Pengendalian intern dimaksudkan untuk membantu organisasi mencapai tujuan dalam mengidentifikasi dan mencegah *fraud* serta melindungi sumber daya organisasi baik berwujud dan tidak berwujud melalui proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi (Gibsi Ompusunggu & Valiant Salomo, 2019).

Variabel pertama yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah transparansi. Transparansi merupakan salah satu komponen penting dalam keberhasilan pemerintahan. Tata kelola yang baik membutuhkan adanya transparansi, partisipasi serta kemudahan akses masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah (Erawati dan Hamanay, 2022). Namun berdasarkan LKPD Batang Hari Audited, (2021) terdapat kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan yakni pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari masih belum profesional, efektif, efisien dan transparan serta akuntabel. Transparansi menjadi salah satu faktor penting yang dibutuhkan dalam perangkat daerah Kabupaten Batang Hari dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka dan jujur. Laporan keuangan yang dipublikasikan secara transparan akan mempermudah publik dalam memantau setiap kebijakan dan keputusan perangkat daerah.

Kurniawati dan Sadeli, (2021) hasil penelitiannya menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Maulana dan Lubis, (2020) menyatakan transparansi pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Hamsinar, (2022) bahwa transparansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Karena prinsip good governance didasarkan pada transparansi kebijakan publik, semakin meningkat transparan laporan keuangan maka semakin meningkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Ferlia dkk., (2023) memperoleh hasil berbeda bahwa transparansi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Karena adanya hal-hal yang dapat menggoyahkan untuk bertindak secara transparan. Sehingga terjadi kegagalan bersikap transparan dalam menjalankan profesinya.

Variabel kedua yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomis, efektif dan efisien, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi (Amin dkk., 2022). Di Kabupaten Batang Hari pendapatan daerah yang bersumber dari PAD belum

optimal dikarenakan kinerja OPD dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah masih relatif rendah, pendapatan sumber pajak belum optimal dan belum sesuai potensinya serta belum maksimalnya pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah (LKPD Batang Hari Audited, 2021). Hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan pendapatan daerah yang berasal dari kekayaan daerah tidak tertata sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

Ferlia dkk, (2023), Laksono, (2023) dan Kurniawati dan Sadeli, (2021) hasil penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan Zubaidah dan Nugraeni, (2023) dalam penelitiannya memperoleh hasil berbeda bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Variabel ketiga yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Adanya pengawasan, pengukuran, dan pengarahan, sumber daya organisasi daerah dikelola dengan sistem pengendalian intern. Laporan keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan memperbaiki sistem pengendalian intern pemerintah (Sujana et al., 2020). Temuan belum memadainya sistem pengendalian intern disebabkan karena pejabat kurang teliti dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas dan perencanaan, kurangnya pengawasan, dan pengendalian yang belum sepenuhnya memenuhi aturan (Yuditiya dkk., 2023).

Imran, (2022) hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD kota Baubau. Penelitian yang dilakukan Ariada and Darmawan, (2023) menyatakan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian oleh Eriani dkk., (2018) juga memperoleh hasil yang sama bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Batang Hari. Sedangkan penelitian oleh Parinding, Sari, and Dasila., (2023) menyatakan penerapan SPIP tidak berdampak positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Variabel keempat yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia adalah kapasitas pengetahuan, kemampuan, dan sikap dalam menyelesaikan pekerjaannya memungkinkan mereka mencapai hasil yang diinginkan. Guna menyusun laporan keuangan berkualitas, maka diperlukan kompetensi sumber daya manusia yang memadai (Kabib dkk., 2021). Di Kabupaten Batang Hari masih terdapat penempatan aparatur pemerintah yang tidak sesuai dengan kompetensi serta sistem penempatan yang belum transparan, terdapat beberapa perangkat daerah yang memiliki struktur tidak lengkap dan masih banyak pula perangkat daerah yang strukturnya lengkap namun tidak berfungsi optimal (LKPD Batang Hari Audited, 2021).

Kompetensi yang dimiliki seseorang salah satunya bisa diketahui dari latar belakang pendidikan. Berikut latar belakang pendidikan pegawai di OPD Kabupaten Batang Hari:

Tabel 1. 2

Kompetensi Pegawai Dilihat dari Latar Belakang Pendidikan

| Latar Belakang Pendidikan | Frekuensi | Perentase (%) |
|---------------------------|-----------|---------------|
| Akuntansi | 7 | 8,54% |
| Manajemen | 33 | 40,24% |
| Ekonomi | 9 | 10,98% |
| Lainnya | 29 | 35,37% |
| SMA | 4 | 4,88% |
| Total | 82 | 100% |

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pegawai OPD Kabupaten Batang Hari sebagian besar lulusan manajemen sebanyak 40,24%, sedangkan akuntansi hanya 8,54% sangat sedikit jika dibandingkan dengan lulusan lainnya (diluar cakupan ilmu ekonomi) sebanyak 35,37%. Berdasarkan survei peneliti menemukan beberapa OPD Batang Hari pegawai di bidang perencanaan dan keuangan bukan dari lulusan akuntansi, manajemen, dan ekonomi tapi dari jurusan lain yang tidak berhubungan dengan ilmu ekonomi dan keuangan.

Yuditiya, (2023) dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian serupa dilakukan Aldino dkk., (2022) menyatakan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Instansi Pemerintah Kota Padang. Sedangkan penelitian oleh Laksono, (2023) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yaitu Ferlia dkk., (2023) yang berjudul pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti menambahkan variabel kompetensi sumber daya manusia. Pemilihan variabel ini karena beberapa OPD di Kabupaten Batang Hari masih terdapat pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau kompetensinya. Perbedaan lainnya yaitu penelitian sebelumnya dilakukan pada BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Malang. Sedangkan pada penelitian ini dilaksanakan pada OPD Kabupaten Batang Hari.

Berdasarkan fenomena di atas, maka dilakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari?

2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari?
4. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari?
5. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari?
6. Berapa besar pengaruh transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari
2. Untuk mengetahui apakah transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari
3. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari
4. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari
5. Untuk mengetahui apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari
6. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan menambah pengetahuan peneliti khususnya tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari.
- b) Bagi pemerintah daerah, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai masukan dan ukuran sejauh mana pengaruh dari transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.